



Lampiran-Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 SERIRIT
Alamat Jln Udayana No 25 A Seririt Telp (0362) 92331
email : smpn1seririt @ yahoo.co .id



SURAT KETERANGAN

Nomor: 005/379/SMP1/2020

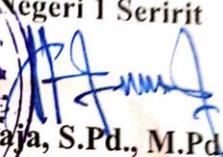
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SMP Negeri 1 Seririt, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kadek Suriani
NIM : 1612011022
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sasta Indonesia
Fakultas : Bahasa dan Seni

Memang benar yang bersangkutan telah melakukan pengumpulan data di SMP Negeri 1 Seririt dalam penyusunan Proposal dari tanggal 6 Maret s/d 8 April 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

UN

Mengetahui
Kepala SMP Negeri 1 Seririt

Nyoman Armaja, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196509201990021002



SILABUS

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Seririt

Kelas : VIII

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kompetensi Dasar	Materi Pokok/ Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran			Indikator	Alokasi Waktu	Sumber Belajar	Karakter
		TM	PT	KMTT				

<p>3.1 Mengidentifikasi unsur unsur teks berita (membanggakan dan memotivai yang di dengar dan di baca)</p>	<p>Materi pembelajaran reguler - Pengertian teks berita - Unsur Unsur teks berita (ASIKSIMBA)</p>	<p>o Melakukan kegiatan observasi dengan teknik wawancara tentang unsur-unsur teks berita yang ada di lingkungan wilayah setempat agar terbangun</p>	<p>Kelompok/Diskusi, tentang: Unsur-unsur teks berita yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya</p>	<p>Pembuatan Karya, tentang: 1. Rancangan gagasan dalam bentuk gambar skets/tertuliskan untuk unsur-unsur teks</p>	<p>3.1.1 Menjelaskan pengertian teks berita 3.1.2 Menentukan unsur-unsur teks berita (ADIKSIMBA)</p>	<p>3 X 40</p>	<p>Buku pelajaran, buku referensi yang relevan, majalah, koran, hasil penelitian, audio-visual, media maya (internet)</p>	<p>Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, Integritas Literasi : Mengamati, membaca, menulis</p>
---	---	--	---	---	--	---------------	---	---

rasa ingin tahu, bersikap santun, bangga/cinta tanah air dan bersyukur sebagai warga bangsa.

berita

2. Laporan

portofolio

dalam berbagai bentuk

seperti tulisan,

foto

dan

gambar

yang

mendes

kripsik



				an unsure- unsur teks berita				
3.2 Menelaah struktur dan kebhasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang di baca dan di dengar	Pengetahuan 1 struktur teks berita (kepala, tubuh, ekor berita) a. Contoh variasi kepala berita b. contoh	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan observasi dengan teknik wawancara tentang struktur dan kebhasaan 	Kelompok/Diskusi , tentang: struktur dan kebhasaan teks berita yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya	Pembuatan Karya, tentang: Rancangan gagasan dalam bentuk gambar skets/tertulis untuk struktur dan kebhasaan	3.2.1 Merinci bagian bagian struktur teks berita yang di baca / di dengar 3.2.2 Menentukan bagian kepala	3 X 40	Buku pelajaran, buku referensi yang relevan, majalah, koran, hasil penelitian,	Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, Integritas Literasi : Mengamati, membaca, menulis

<p>variasi tubuh berita</p> <p>c. contoh variasi ekor berita</p> <p>d. cara menyambungkan informasi menjadi berita</p>	<p>n teks berita yang ada di lingkungan wilayah setempat agar terbangun rasa ingin tahu, bersikap santun, bangga/cinta tanah air dan bersyukur</p>	<p>teks berita</p> <p>Laporan portofolio dalam berbagai bentuk seperti tulisan, foto dan gambar yang mendeskripsikan struktur dan kebahasaan teks berita</p>		<p>berita, tubuh berita, dan ekor berita pada teks berita yang disajikan</p> <p>3.2.3 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks berita</p> <p>3.2.4 Mendata</p>	<p>berita, tubuh berita, dan ekor berita pada teks berita yang disajikan</p> <p>3.2.3 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks berita</p> <p>3.2.4 Mendata</p>	<p>audio-visual, media maya (internet)</p>	
--	--	---	---	---	---	--	--

		<p>sebagai warga bangsa.</p>		<p>penggunaan bahasa dalam teks berita</p> <p>3.2.5 Menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata tidak baku dalam teks berita</p>			
--	--	--------------------------------------	---	---	--	--	--

<p>4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, kinesik)</p>	<p>4.2.1 kaidah kebahasaan teks berita</p> <p>a) contoh benar dan contoh salah kata baku dan tidak baku</p> <p>b) contoh penggunaan kalimat langsung konjungsi.keterangan waktu dan kata kerja mental</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan observasi dengan teknik wawancara tentang menyajikan teks berita yang ada di lingkungan wilayah setempat agar terbangun 	<p>Kelompok/Diskusi, tentang: menyajikan teks berita yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya</p>	<p>Pembuatan Karya, tentang: Rancangan gagasan dalam bentuk gambar skets/tertulis untuk menyajikan teks berita</p> <p>Laporan portofolio dalam berbagai bentuk seperti tulisan, foto dan gambar</p>	<p>4.2 Mengumpulkan isi teks berita</p>	<p>3 x 40</p>	<p>Buku pelajaran, buku referensi yang relevan, majalah, koran, hasil penelitian, audio-visual, media maya (internet)</p>	<p>Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, Integritas</p> <p>Literasi : Mengamati, membaca, menulis</p>
--	---	--	--	---	---	---------------	---	---

		rasa ingin tahu, bersikap santun, bangga/cinta tanah air dan bersyukur sebagai warga bangsa.		yang mendeskripsikan menyajikan teks berita				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



Seririt, 15 maret 2020

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the right of the stamp.

Ketut Suarmika Jaya, S.Pd.

NIP19601231 199512 2 001



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMP N 1 SERIRIT

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas : VIII

Materi Pokok : Teks Berita

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

A. KOMPETENSI INTI

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3. Memahami pengetahuan (Faktual, konseptual, dan prosedural) Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (Menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Kompetensi Dasar		Indikator Pencapaian Kompetensi	
3.2	Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan	3.2.1	Menemukan isi berdasarkan struktur teks berita
		3.2.2	Menemukan unsur

	dibaca.		kebahasaan teks berita
		3.2.3	Menganalisis aspek kebahasaan teks berita
4.2	Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, dan kinesik)	4.2.1	Menyusun teks berita dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan
		4.2.2	- Menyajikan teks berita secara lisan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan pertama

Setelah mengikuti pembelajaran tentang teks berita, siswa diharapkan dapat:

1. Menemukan isi berdasarkan struktur teks berita secara benar
2. Menjawab pertanyaan tentang isi berdasarkan struktur teks berita dengan benar

Pertemuan Kedua

Setelah mengikuti pembelajaran tentang teks berita, siswa diharapkan dapat:

1. Menemukan unsur kebahasaan teks berita secara benar

Pertemuan Ketiga

Setelah mengikuti pembelajaran tentang teks berita, siswa diharapkan dapat:

1. Menemukan data dan informasi sebuah berita dengan benar
2. Menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita dengan benar

Pertemuan Keempat

Setelah mengikuti pembelajaran tentang teks berita, siswa diharapkan dapat menyunting teks berita dan menulis teks berita secara final berdasarkan penyuntingan yang telah dilakukan.

D. MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengertian teks berita

Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat dibaca di media cetak. Berita bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca atau pendengar.

2. Struktur teks berita

Ada beberapa struktur yang membangun teks berita yang identik dengan piramida terbalik. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri atas orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Struktur teks berita biasanya digambarkan dengan piramida terbalik.

1. Orientasi (kepala berita)

Bagian pembuka yang berisikan kalimat pembuka sebuah teks berita.

2. Isi peristiwa (tubuh berita)

Bagian yang merupakan inti paragraf dari sebuah teks berita.

3. Sumber berita(ekor berita)

bagian dari teks berita yang biasanya berada pada akhir teks berita yang berisikan sumber berita.

3. Unsur kebahasaan teks berita

1. Menggunakan bahasa baku
2. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung
3. Menggunakan konjungsi bahwa
4. Penggunaan kata kerja mental
5. Penggunaan konjungsi temporal/ kronologis

Langkah/	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
----------	-----------------------	-------

Tahap		
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> a. peserta didik melakukan doa bersama sesuai kepercayaan agama masing-masing b. Guru menanyakan ketidakhadiran siswa. c. Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. d. Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai kompetensi. 	10 (menit)
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru menanyakan judul sebuah berita Siswa menuliskan prediksi isi berita berdasarkan judul tersebut. (literasi) b. Guru menanyakan video berita yang disampaikan oleh pembawa berita. c. Siswa menemukan isi berita yang ditayangkan. d. Siswa menemukan struktur berita yang ditayangkan. e. Guru menyampaikan keterkaitan tayangan berita dengan materi yang akan diajarkan. f. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari dua orang. g. Guru memberikan sebuah teks berita ke tiap kelompok. h. Siswa mengamati teks berita. (literasi) i. Dengan dipandu guru, setiap kelompok menemukan isi berita berdasarkan struktur teks berita j. Siswa menuliskan unsur kebahasaan teks berita k. Siswa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok di depan kelas. j. Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. 	60(menit)
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah dipelajari. b. Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah berlangsung. c. Siswa menerima tugas dari guru untuk menemukan informasi teks berita berdasarkan struktur berita. d. Siswa merefleksi proses KBM yang berlangsung. 	10(menit)

	e. Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.	
--	--	--

6. Terdapat penjelasan mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa

E. METODE/MODEL PEMBELAJARAN

Pendekatan : Saintifik

Metode : *Discovery Learning*

F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Media:

- LCD proyektor

-Leptop

2. Bahan

-Teks Berita

3. Sumber Belajar

-Buku Teks Bahasa Indonesia kelas VIII

- Koran, TV, dan sumber lainnya

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN

1. Teknik Penilaian

a. Sikap (spiritual dan sosial)

- Observasi jurnal harian

b. Pengetahuan

- Tes tertulis uraian

Teks Berita

Sebulan Berlalu, Air Masih Menggenangi Beberapa Lokasi di Manado

Banjir bandang yang menerjang Manado telah berlalu hampir sebulan. Namun tumpukan sampah dan lumpur masih aja terlihat di beberapa wilayah. Bahkan di beberapa ruas jalan dan lorong, air sisa sisa banjir terlihat tergenang sejak Senin (10/2/2018), air setinggi 20 cm terlihat di ruas jalan Persimpangan Plaza dan depan Makmur, Kecamatan Wenang. Salah satu warga, Yudi yang terlihat masih berusaha membersihkan lumpur dari rumah miliknya, mengaku kesal dengan kondisi tersebut.

Warga setempat berasumsi banjir ini disebabkan karena air bercampur lumpur di jalan masih ada. Selain di persimpangan Plaza, air dan lumpur juga masih terlihat di lorong samping Klentheng Kwang Kong, Kampung Cina. Di lorong tersebut beberapa rumah warga keturunan Tionghoa terlihat masih dipenuhi lumpur. Sampah dan lumpur yang telah lama terendap menimbulkan bau yang tidak sedap. Tak ayal, warga yang melintas di kawasan ramai tersebut harus menutup hidung mereka.

Pemerintah kota Manado menyatakan bahwa akan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu. “Air di sini tidak mau surut, tetap tergenang. Kalau hujan datang, air langsung masuk di dalam rumah, karena selokan tersumbat,” ujar Yudi.

Dengan mengeraahkan banyak pihak diharapkan permasalahan ini cepat terselesaikan sehingga tidak menimbulkan banyak korban jiwa di kota ini.

Diperkirakan sampah yang ditinggalkan banjir bandang tersebut mencapai 100.000 kubik. Sementara Tempat Pembuangan Sampah di Sumompo sudah melebihi kapasitas tampung.

Sumber: Kompas (Senin, 10 Februari 2017)

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan surat pribadi tersebut!

No	Pertanyaan
1.	Identifikasilah struktur pada teks berita tersebut!
2.	Identifikasilah pokok-pokok/isi berita tersebut!
3.	Identifikasi kaidah kebahasaan teks berita tersebut !
4.	Suntinglah teks berita tersebut!

2. Pedoman penskoran

No.	Deskriptor	Skor
1.	Dapat mengidentifikasi struktur berita	5
2	Dapat mengidentifikasi pokok-pokok/isi berita tersebut	6
3	Dapat menjawab kalimat kaidah kebahasaan teks berita tersebut	5
4	Dapat menyunting teks berita	4

Nilai : skor (20) x 5 = 100

c. Pembelajaran Remedial

Kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:

- Pembelajaran ulang
- bimbingan perorangan
- belajar kelompok
- pemanfaatan tutor sebaya

bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.

d. Pembelajaran Pengayaan

Berdasarkan hasil analisis penilaian, siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber.

Seririt, 16 Maret 2020

Mengetahui/Menyetujui,

Guru Bahasa Indonesia



Ketut Suarmika Jaya, S.Pd.

NIP19601231 199512 2 001

Peneliti



Kadek Suriani

Nim. 1612011022



TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN

Nama Narasumber : Ketut Suarmika Jaya, S.Pd

Jabatan : Guru Bahasa Indonesia

Tanggal Wawancara : 6 Maret 2020

Tempat Wawancara : SMP Negeri 1 Seririt

Peneliti : Apakah guru menggunakan media teks dalam pembelajaran menulis berita ? (misalnya media surat kabar)

Narasumber : Dalam proses pembelajaran tentang teks berita, saya memberikan tugas siswa untuk membawa Koran yang terkini dan berita yang termuat dalam surat kabar saya gunakan sebagai media teks. Selain itu, terkadang saya juga menyarankan siswa untuk mendengarkan berita yang tayang di televisi dan mencatatnya dalam buku tulis berita apa yang telah didengarkan.

Peneliti : Media teks apakah yang digunakan guru untuk membantu siswa dalam pembelajaran menulis berita ? (misalnya teks berita langsung Koran Kompas apakah guru menggunakan itu)

Narasumber : media teks yang digunakan salah satunya surat kabar *Kompas*, Bali post, terkadang ada juga siswa yang membawa koran Jawa post. Surat kabar yang paling dominan siswa bawa yaitu surat kabar *Kompas*, dikarenakan bapak menyarankan jika bisa membawa surat kabar *Kompas* meskipun tidak terkini. Oleh karena itu terkadang siswa mendapatkan surat kabar tersebut dari perpustakaan sekolah.

Peneliti : Pernahkah Ibu/Bapak Guru memanfaatkan berita langsung yang termuat dalam surat kabar Kompas sebagai media pembelajaran menulis berita ?

Narasumber : Tentu saja sangat memanfaatkan berita langsung yang termuat dalam surat kabar. Hal itu dikarenakan, dengan memanfaatkan berita langsung memudahkan siswa dalam menemukan apakah itu berita atau tidak.

Peneliti : Mengapa bapak/ ibu guru memilih menggunakan berita *Kompas* sebagai media pembelajaran ?

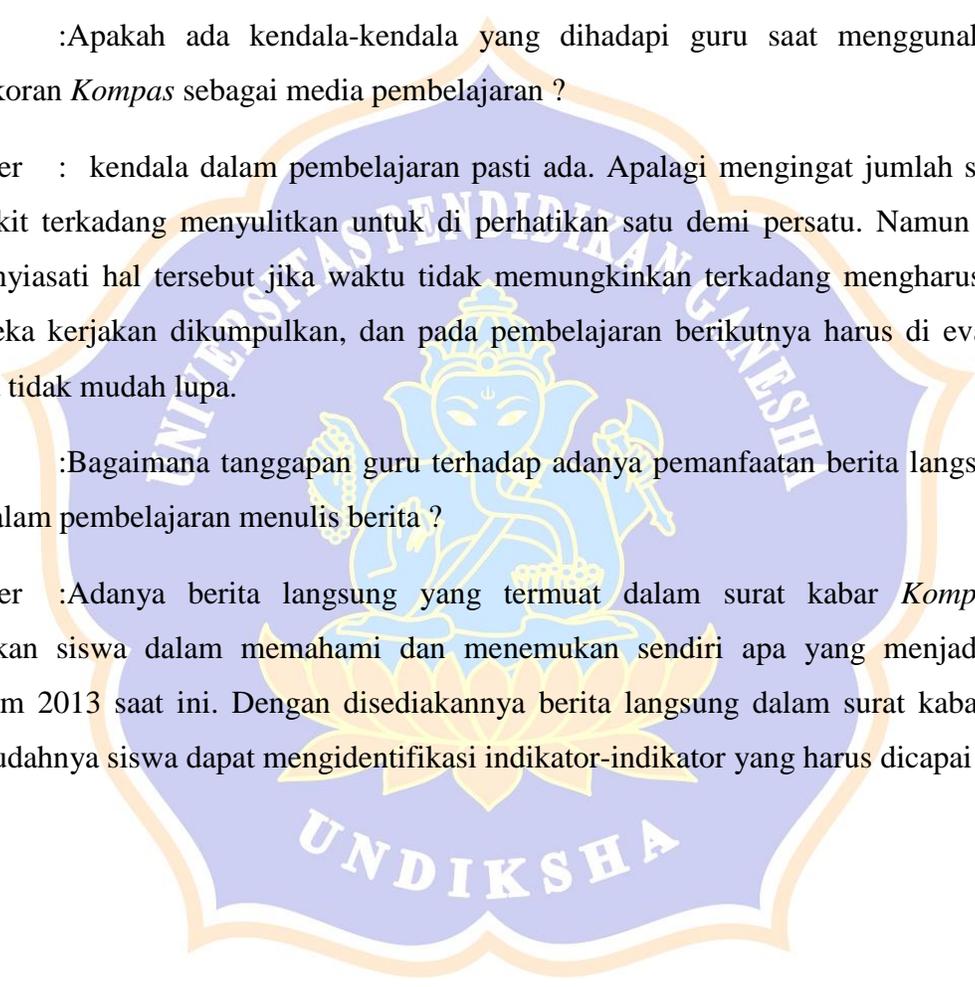
Narasumber : Alasan mengapa memilih berita *Kompas* tentu saja salah memberikan siswa menganalisis sebuah berita yang termuat dalam surat kabar *Kompas*. Siswa sangat mudah menganalisis 5W+1H yang termuat dalam berita. Hal itu dikarenakan berita langsung yang termuat dalam surat kabar *Kompas* 5W+1Hnya sangat terlihat sehingga memudahkan siswa.

Peneliti : Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi guru saat menggunakan berita langsung koran *Kompas* sebagai media pembelajaran ?

Narasumber : kendala dalam pembelajaran pasti ada. Apalagi mengingat jumlah siswa yang tidak sedikit terkadang menyulitkan untuk di perhatikan satu demi persatu. Namun terkadang untuk menyasati hal tersebut jika waktu tidak memungkinkan terkadang mengharuskan tugas yang mereka kerjakan dikumpulkan, dan pada pembelajaran berikutnya harus di evaluasi lagi agar siswa tidak mudah lupa.

Peneliti : Bagaimana tanggapan guru terhadap adanya pemanfaatan berita langsung koran *Kompas* dalam pembelajaran menulis berita ?

Narasumber : Adanya berita langsung yang termuat dalam surat kabar *Kompas* sangat memudahkan siswa dalam memahami dan menemukan sendiri apa yang menjadi tuntutan dikurikulum 2013 saat ini. Dengan disediakannya berita langsung dalam surat kabar *Kompas* dengan mudahnya siswa dapat mengidentifikasi indikator-indikator yang harus dicapai siswa.



INSTRUMEN PENELITIAN

Tanggapan siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Seririt terhadap kebermanfaatan penggunaan teks berita langsung surat kabar *Kompas* sebagai media pembelajaran menulis berita.

A. Identitas Responden

Nama : Fariz Maulana Akbar Marsudi

Kelas : VIII

B. Petunjuk Pengisian

Pilihlah alternative jawaban dari setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan anda, dengan cara memberi tanda centang (√) pada jawaban yang anda pilih. Sesuai alternatif yang disediakan.

No	Pernyataan	SB	B	CB	KB	STB
1.	Pembelajaran menulis berita menggunakan media pembelajaran surat kabar <i>Kompas</i> bermanfaat dalam menulis berita?	√				
2.	Apakah dengan memanfaatkan berita langsung dalam surat kabar <i>Kompas</i> memudahkan anda dalam menentukan Kaidah-kaidah kebahasaan dalam berita?		√			
3.	Apakah dengan Judul pemberitaan yang menarik akan memberi manfaat bagi anda dalam menulis berita ?		√			
4.	Apakah dengan memanfaatkan berita langsung dalam surat kabar <i>Kompas</i> memudahkan anda dalam menentukan unsur-unsur 5W-1H berita ?	√				
5.	Apakah dengan memanfaatkan Berita langsung surat kabar memudahkan anda untuk	√				

	mengidentifikasi struktur teks berita.					
--	--	--	--	--	--	--

Keterangan

SB : Sangat Bermanfaat (skor 5)

B :Bermanfaat (skor 4)

KB :Kurang Bermanfaat (skor 3)

TB :Tidak Bermanfaat (skor 2)

STB :Sangat Tidak Bermanfaat (skor 1)



INSTRUMEN PENELITIAN

Tanggapan siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Seririt terhadap kebermanfaatan penggunaan teks berita langsung surat kabar *Kompas* sebagai media pembelajaran menulis berita.

A. Identitas Responden

Nama : Gede Aditya Utama

Kelas : VIII

B. Petunjuk Pengisian

Pilihlah alternative jawaban dari setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan anda, dengan cara memberi tanda centang (√) pada jawaban yang anda pilih. Sesuai alternatif yang disediakan.

No	Pernyataan	SB	B	KB	TB	STB
1.	Pembelajaran menulis berita menggunakan media pembelajaran surat kabar <i>Kompas</i> bermanfaat dalam menulis berita?	√				
2.	Apakah dengan memanfaatkan berita langsung dalam surat kabar <i>Kompas</i> memudahkan anda dalam menentukan Kaidah-kaidah kebahasaan dalam berita?		√			
3.	Apakah dengan Judul pemberitaan yang menarik akan memberi manfaat bagi anda dalam menulis berita ?	√				
4.	Apakah dengan memanfaatkan berita langsung dalam surat kabar <i>Kompas</i> memudahkan anda dalam menentukan unsur-unsur 5W-1H berita ?		√			
5.	Apakah dengan memanfaatkan Berita langsung					

surat kabar memudahkan anda untuk mengidentifikasi struktur teks berita.	√				
--	---	--	--	--	--

Keterangan

SB : Sangat Bermanfaat (skor 5)

B :Bermanfaat (skor 4)

KB :Kurang Bermanfaat (skor 3)

TB :Tidak Bermanfaat (skor 2)

STB :Sangat Tidak Bermanfaat (skor 1)



Insiden Serangan Harimau Pukul Wisata Pagar Alam

PAGAR ALAM, KOMPAS — Insiden serangan harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) memukul pariwisata di kawasan Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Padahal, pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi setempat. Sejak insiden serangan harimau di perkemahan Taman Wisata Gunung Dempo, pertengahan November, pemerintah setempat mengeluarkan larangan berkemah sampai pukul 17.00. Sejumlah calon wisatawan yang semula berencana berkunjung saat pergantian tahun membatalkan kunjungan ke Gunung Dempo.

Muhammad Ramadian, pengusaha penginapan, mengatakan, 130 calon wisatawan membatalkan pemesanan tempat setidaknya dalam sebulan terakhir. Mereka rata-rata karyawan perusahaan yang hendak merayakan malam pergantian tahun bersama. Potensi kunjungan wisatawan di 22 vila miliknya pada pergantian tahun diperkirakan turun hingga 80 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Biasanya, sejak akhir November, pemesanan penginapan sudah penuh," kata Ramadian yang berpotensi kehilangan Rp 180 juta saat musim liburan seperti ini, Sabtu (21/12/2019).

Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan, potensi keuntungan dari pariwisata di Pagar Alam anjlok hingga 50 persen. "Padahal, momen Tahun Baru paling banyak menarik wisatawan," lanjutnya.

Untuk menanggulangi isu harimau yang terus berkembang, pihaknya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konflik ini. Meski serangan harimau terjadi di sekitar Tugu Rimau yang menjadi titik awal pendakian Gunung Dempo, ia memastikan wilayah lain aman dikunjungi.

Berdasarkan informasi yang dia peroleh dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel, kawasan Bukit Dingin yang berbatasan dengan area Tugu Rimau aman dan tidak terdeteksi lagi keberadaan harimau.

Kawasan Gunung Dempo memiliki pemandangan menawan, berselimutkan hamparan hijau kebun teh. Jelang Tahun Baru, wisatawan biasanya memasang tenda atau menginap di vila untuk menikmati keindahan alam di gunung yang berjarak sekitar 282 kilometer dari Palembang ini. (RAM)

Validasi Lapangan Penting

Untuk memastikan kebenaran sebuah desa fiktif atau tidak, Wapres Amin menginstruksikan agar validasi tak hanya di atas kertas, tetapi juga langsung turun mengecek ke lapangan.

JAKARTA, KOMPAS — Validasi penerima dana desa di seluruh Tanah Air diharapkan tak hanya dengan menerima laporan di belakang meja, tetapi harus turun ke lapangan dengan mengecek langsung. Pengecekan ke lapangan penting untuk memastikan penyaluran setiap dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai target memeratakan kesejahteraan dengan memberdayakan masyarakat desa.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menjawab pertanyaan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). "Ya, itu harus terus di-update. Mestinya memang tidak hanya menerima laporan (di atas meja), tetapi juga pengecekan (ke lapangan),

betul apa tidak jumlah desa itu. Saya anjurkan untuk terus (validasi di lapangan). Siapa tahu masih ada yang belum terdeteksi dan belum diketahui (adanya lagi desa fiktif)," kata Amin.

Validasi data berikut cek lapangan sebagaimana dimaksud Wapres Amin penting dilakukan secara periodik dan terus-menerus mengingat cakupan wilayah yang luas dan alokasi dana yang makin meningkat setiap tahun. "Antisipasi ke depan (harus) terus ada. Secara periodik dilakukan pengecekan," lanjut Wapres.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) sedang menyelidiki dugaan korupsi dana desa akibat adanya desa fiktif di Kabupaten

Konawe, Sultra. Dari 56 desa yang dilaporkan fiktif, penyidik melakukan pengecekan kegiatan fisik di 23 desa yang tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, terdapat dua desa yang tidak memiliki warga sama sekali.

Istilah desa fiktif muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan adanya desa fiktif setelah mendapat laporan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sesuai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perencanaan, Jakarta, baru-baru ini. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama Komisi XI DPR pada Senin (4/11).

Saat dihubungi semalam, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengungkapkan, modus penyelewengan dana desa bukan sesuatu yang baru. Pengelembungan anggaran, program kerja, hingga desa fiktif menjadi temuan KPK selama ini. Rekomendasi juga pernah disampaikan mengingat alokasi dana desa yang cukup besar.

Febri sebelumnya menyatakan, 34 desa penerima dana desa dari 56 desa yang dilaporkan diduga bermasalah. Tiga desa di antaranya fiktif dan 31 desa lain, meski keberadaannya nyata, surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. Saat desa dibentuk sebenarnya ada moratorium pembentukan desa dari

Kementerian Dalam Negeri. Namun, diduga keputusannya tetap diterbitkan untuk mendapatkan alokasi dana. Desa-desanya itu diidentifikasi tidak sesuai prosedur, menggunakan dokumen tidak sah yang merugikan keuangan negara atau daerah.

Perda tak terdaftar

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Apono menuturkan, ketentuan dasar pendirian 56 desa di Kabupaten Konawe diketahui tidak pernah terdaftar di badan hukum daerah. Meski demikian, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Konawe

Validasi Lapangan Penting

(Sambungan dari halaman 1)

Nomor 2/2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-desanya dalam Wilayah Kabupaten Konawe tercatat hingga ke Kementerian dan menjadi dasar mendapatkan dana desa selama tiga tahun terakhir.

"Kalau untuk Perda 7/2011 itu, saya bisa sampaikan, memang tidak pernah tercatat untuk pemekaran desa. Namun, Perda Nomor 7/2011 hanya tercatat sebagai pengesahan APBD 2011. Bisa dinilai sendiri dasar pendirian dari 56 desa itu karena sejauh ini tidak ada aturan itu (dasar hukum), kecuali yang masuk di dua perda lainnya," kata Apono.

Dua perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-desanya dalam Kabupaten Konawe untuk 42 desa serta Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-desanya untuk 34 desa.

Berdasarkan Perda Nomor 7/2011, yang salinannya diterima Kompas, total desa yang masuk dalam ketentuan tersebut sebanyak 56 desa. Perda tersebut ditandatangani oleh pejabat daerah setempat pada waktu itu.

Meski secara legal formal aturan Perda Nomor 7/2011 tersebut tak pernah tercatat, Apono melanjutkan, sebanyak 56 desa itu secara administratif memiliki wilayah, warga,

dan struktur perangkat desa. Pelantikan kepala desa, penyaluran dana desa, hingga proses pemilihan politik juga berlangsung selama bertahun-tahun.

"Setiap tahun juga ada audit dari berbagai lembaga negara, termasuk untuk penggunaan dana desa," ucapnya. Akan tetapi, kata Apono, jangan hanya melihat legalitas, tetapi fakta di lapangan seperti apa. "Karena semuanya kembali ke masyarakat, warga itu terdaftar di desa mana kalau desanya tidak ada," ujarnya.

Di satu sisi, menurut Apono, penetapan suatu desa memang harus didahului dengan penetapan dalam perda. Proses aturan tersebut telah melalui persiapan dan berbagai hal prosedural lain. Setelah adanya aturan tersebut, pemilihan perangkat dan berbagai hal yang lain baru resmi berlaku.

Fokus penyelidikan polda

Perda pendirian 56 desa di Konawe memang unik. Meski tidak pernah tercatat sebagai produk hukum daerah, 56 desa yang ditetapkan di dalamnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Dalam laman Kemendagri.go.id, pada daftar kode wilayah Sultra 2019, sebanyak 56 desa tercantum jelas, punya kode wilayah, dengan keterangan berdasarkan Perda Nomor 7/2011.

Dasar aturan itu kini menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Sejalan ini, Polda Sultra telah memeriksa 57 saksi

terkait kasus desa dan aturan fiktif ini. Kepala Polda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal (Pol) Merdisyam menuturkan, pihaknya telah meminta audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait dugaan kerugian negara dari kejadian ini. Tidak hanya itu, keterangan saksi ahli hukum tata negara dan pidana juga sedang diminta untuk proses penyelidikan mendalam.

"Kalau untuk aturannya, itu yang kami dalam. Termasuk akan meminta keterangan pihak kementerian. Kami masih mencari dan menyelidiki proses pembentukan desa dan perda. Pemeriksaan dokumen dan saksi masih berjalan," tutur Merdisyam.

Terkait dengan desa fiktif, anggota Komisi II DPR, Saan Mustopa, menyatakan, dugaan adanya desa fiktif tidak perlu membuat pemerintah mengevaluasi program dana desa. Pemerintah cukup memperketat verifikasi serta validasi desa sekaligus jumlah penduduk yang menjadi salah satu dasar penghitungan.

Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Yenny Sucipto menambahkan, sistem evaluasi dana desa yang berlangsung sejak tahun 2015 dinilai tidak berjalan. Sebab, keberadaan desa fiktif seharusnya dapat segera diketahui jika sistem pengawasan (*monitoring*) dan evaluasinya lancar dan tepat.

(LAS/NTA/IAN/JAL/NIK)

Jaringan Terorisme Sumut Terungkap

Polisi telah menangkap 18 tersangka terkait bom bunuh diri di Markas Polresta Medan. Dari penangkapan yang dilakukan di Sumatera Utara dan Aceh ini, diketahui bahwa jaringan pelaku teror cukup banyak di Sumut.

MEDAN, KOMPAS — Pengejaran para terduga teroris terkait kasus bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Medan berhasil memungkinkan jaringan terorisme di Sumatera Utara. Dalam empat hari sejak Rabu lalu hingga Sabtu (16/11/2019), 18 tersangka teroris ditangkap di Sumut dan Aceh telah ditangkap.

Penangkapan terakhir kemarin dilakukan di Desa Kota Darat, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penangkapan ini, 2 terduga teroris tewas ditembak saat mau ditangkap, tersangka dua lainnya meninggal dunia pada Minggu melukai seorang anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror di badan tangan, pinggang, dan paha.

Sejumlah material yang siap dibakar menjadi bom ditunjukkan dalam penangkapan tersebut. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya dua tersangka teroris di lokasi tersebut, yakni di Kecamatan Kering, Belawan, Medan, sudah ditemukan bom bunuh diri di Markas Polresta Medan. Cukupan banyak jaringan pelaku cukup banyak di Sumut, ujar Kepala Polda Sumatera Utara Aspektur Jen-Deral Agus Andrianto di RS Bhayangkara Medan kemarin.

Dari 18 tersangka teroris yang ditangkap dalam empat hari terakhir, 15 orang ditangkap di Sumut dan 3 di Aceh. Jumlah itu masih bisa bertambah karena penangkapan teroris di jaringan pelaku bom bunuh diri di Markas Polresta Medan. "RMN masih terus dilacak. Apalagi karena kami akan memberikan rasa aman kepada masyarakat," kata Agus.

Aksi bom bunuh diri yang dilakukan RMN pada Rabu lalu diduga merupakan bagian dari upaya simpatisan NISIS dalam di Irak dan Suriah (NIS) untuk meniadakan eksistensinya di Indonesia.

Sejak 2015 Peneliti Yayasan Prasti Perdamaian (YPP) Thayep Muli, mengatakan, penyebaran

BACA JUGA:

Pusaran Mematikan di Karnal Masya
Jaringan kelompok teroris memanfaatkan teknologi informasi tak hanya untuk beraksi, tetapi juga untuk perekrutan dan transfer ideologi radikal.

bahan radikal dan terorisme di Sumut banyak terjadi sejak 2015 setelah Syamsuddin Paksiyah kembali dari Suriah. Ia bagian dari anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang menyerang Markas Polda Sumut pada Sabtu.

Terkait RMN, Thayep tak bisa beres-beres merupakan bagian dari simpatisan NISIS. RMN diduga kuat berbagi kepada NISIS. Saat itu, empat polisi juga di Markas Polresta Hamparan Perak ditembak hingga membuat tiga di antaranya meninggal.

Adapun penangkapan terduga teroris di Hamparan Perak kemarin, dimulai dengan perintah untuk memeriksa dua sepeda motor yang dimiliki oleh dua terduga teroris yang sedang berjualan di Desa Kota Darat. Saat itu, terduga teroris sedang berjualan di teras rumah. Lokasi penangkapan itu sekitar 40 kilometer dari Kota Medan.

Sekelompok teroris yang melambatkan beladinda ramadannya, Saat itu, wasiat ditunda menjauh dari sekitar lokasi. Para terduga teroris itu, tidak pernah melihatnya. Bahkan warga desa kami," kata Herlina, Kepala Sumut. Iden terduga teroris terungkap ditembak saat

(Bersebutan ke hlm 7 kol 4-7)

Jaringan Terorisme Sumut Terungkap

(Sambungan dari halaman 1)

melawan. Tersangka yang ditangkap dibawa ke Markas Brigade Mobil untuk diperiksa. Adapun polisi yang terluka sudah ditangani dan stabil di RS Bhayangkara Medan.

Pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, mencatat, sejak 2010, lebih dari 70 persen serangan teroris menasar polisi dan kantor polisi. Ini diduga sebagai balas dendam atas penangkapan teroris oleh polisi.

Menurut Zaki, mayoritas pelaku teror di Indonesia berkomunikasi dengan NISIS. Sebanyak 80 persennya punya hubungan dengan JAD, baik secara struktural maupun fungsional.

Kini, sebagian pelaku teror berketerampilan tinggi masih ada di Irak dan Suriah. Tokoh berideologi kuat di penjara. Kondisi ini membuat para "simpatisan" menjadi pelaku teror. Itu membuat bom yang diledakkan rata-rata bom berdaya ledak rendah

Deradikalisasi

Menurut salah satu orang yang terlibat penyerangan di

Mapolsek Hamparan Perak, sembilan tahun lalu, Khairul Ghazali, proses deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya belum menyentuh narapidana berideologi kuat.

Bahkan, sejumlah narapidana aktif menubar radikalisme dari penjara, termasuk melalui media sosial untuk merekrut simpatisan baru. Temuan Tim Densus 88 Antiteror, istri pe-laku RMN, yaitu DA, aktif berkomunikasi lewat media sosial dengan narapidana terorisme berinisial I di Lapas Kelas II Wanita Medan. Mereka juga diketahui kerap bertemu di lapas (Kompas.id, 14/11/2019).

"Maka dari itu, literasi digital sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya pencegahan radikalisme," kata pendiri Yayasan Prasti Perdamaian, Noor Huda Ismail.

Selain itu, untuk meredakan paparan radikalisme, perlu ditetapkan siapa dan kelompok mana yang terpapar. Setelah itu, pemerintah perlu mengajak para tokoh masyarakat mencegah melalui dialog atau kerja

kemampuan yang lain.

Terkait deradikalisasi, kata Ghazali, efektif apabila melibatkan mantan narapidana terorisme yang pernah memiliki keyakinan sama untuk mendekati mereka. "Itu pun tetap harus dipantau dan dievaluasi prosesnya karena tidak semua mantan narapidana memiliki 'frekuensi' yang sama," katanya.

Sejauh ini, meski upaya deradikalisasi oleh BNPT belum maksimal, jumlah narapidana yang meninggalkan ideologinya masih lebih banyak daripada yang tetap radikal.

Dalam diskusi di Jakarta, Deputi Deradikalisasi BNPT Irfan Idris mengatakan, deradikalisasi memang harus berkesinambungan dan holistik. Saat ini masih disiapkan desain besar strategi lebih komprehensif untuk menangani terorisme.

Kerap disangkal

Noor Huda mengingatkan, keberadaan kelompok radikal di tengah masyarakat masih kerap disangkal. Sikap itu, tanpa sadar, membuka ruang bagi radikalisme dan terorisme tumbuh subur.

Adapun Kapolda Sumut mengatakan, masih ada saja pihak yang menilai penangkapan terduga teroris sebagai pengalihan isu. Satu di antaranya saat polisi menangkap tiga terduga teroris sebelum pelantikan presiden-wapres terpilih.

"Tidak ada untung mengalihkan isu. Mereka benar-benar ada di sekitar kita," ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, ideologi kekerasan yang menjadi landasan terorisme tumbuh subur dalam lingkungan yang mendukung.

"Ideologi apa pun, dalam hal ini agama, dipakai sebagai legitimasi moral mereka melakukan aksi terornya. Adapun persoalan sebenarnya, yakni ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan kepincangan penegakan hukum, jadi pemicu mereka melakukan itu," katanya.

Pendekatan di luar keamanan, seperti memupus kesenjangan dalam banyak hal, dinilai akan berdampak panjang. Hal itu harus dilakukan selain penangkapan dan pengejaran terduga teroris.

(NSA/NDU/REK/IGA)

Lanjutan 17 November 2019

Tahapan Pilkada 2020 Direvisi

KPU akan merevisi Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020. Akibatnya, jadwal pengumuman syarat minimal dukungan calon perseorangan diundur.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum tengah merevisi jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Tahapan terdekat yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan sebelumnya, yakni pengumuman syarat minimal dukungan calon perseorangan yang sedianya dijadwalkan pada 25 November, diundur hingga Desember 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirim surat edaran tertanggal 22 November ke semua KPU daerah mengenai perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Anggota KPU, Evi Novida Ginting, menjelaskan, pemunduran jadwal dilakukan untuk kepentingan harmonisasi terkait dengan pencalonan dan pemutakhiran daftar pemilih Pilkada, yang dekat ada revisi terhadap PKPU No 15/2019.

"Sesuai jadwal semula, pada 25 November dilakukan pengumuman syarat minimal dukungan calon perseorangan. Namun, karena ada upaya harmonisasi dengan Kumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) terkait PKPU Asasi Manusia itu diundurlainnya," kata Evi, Sabtu (23/11/2019), di Jakarta.

Ia memastikan pengunduran jadwal tahapan Pilkada tidak akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pilkada, terutama untuk calon perseorangan. Alasannya, syarat minimal dukungan telah disosialisasikan sejak Oktober 2019 sehingga pengunduran waktu pengumuman syarat minimal dukungan itu tidak mengganggu tahapan dan proses secara signifikan.

Mengenai kapan syarat

minimal bisa dipastikan, "Tanggalnya belum bisa dipastikan karena masih dalam pembahasan dan harmonisasi dengan Kumham. Diperkirakan mundur hingga awal Desember 2019. Namun, sampai PKPU itu diundurkan, baru diketahui secara pasti syarat dan jadwal tahapan pilkada," kata Evi.

KPU tengah menunggu pengundangan PKPU tentang Pencalonan yang antara lain memuat larangan bekas terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada 2020.

Di samping merevisi jadwal Pilkada 2020, KPU juga tengah menggodok draft pemutakhiran data pemilih pilkada. Di dalamnya akan dimuat norma mengenai penggunaan rekaptulasi elektronik (e-rekap).

Timbulkan ketidakpastian

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (NDEI) Lektor Nafis Gumay mengatakan, idealnya jadwal dan tahapan pemilihan tidak diubah mendekati berlangsungnya tahapan. Dengan demikian, tidak muncul keraguan atau ketidakpastian jadwal tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara.

"Idealnya perubahan dilakukan jauh-jauh hari sebelum dimulainya tahapan sehingga ada cukup waktu bagi penyelenggara di daerah untuk melakukan persiapan," kata Har.

Menurut dia, lazimnya KPU mengubah tahapan atau jadwal pemilihan karena ada perubahan waktu yang tak dapat diabaikan satu dan tahapan yang lain. Kendati perubahan jadwal telah dilakukan jauh hari, dimungkinkan tetap ada perubahan apabila ada kebutuhan penyelesaian.

"Bilamana ada satu kali perubahan, harus dibantu secara komprehensif supaya tak ada lagi perubahan jadwal. Perlu perubahan jadwal yang ubahannya ubah tahapan yang

(Bersambung ke him 7 kol 4-7)

LANJUTAN 2A-Nov-2019 Tahapan Pilkada 2020 Direvisi

(Sambungan dari halaman 1)

dilakukan berkali-kali menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya," katanya.

Pemunduran satu tahapan tidak selalu berpotensi memundurkan tahapan lainnya. Namun, menurut Hadar, hal ini menjadi persoalan jika ada aturan khusus dari undang-undang tentang waktu suatu tahapan.

"Sebagai contoh, kalau jadwal kampanye diatur tiga hari setelah pencalonan, maka jika pencalonan diundur, secara otomatis jadwal kampanye ikut diundur sesuai ketentuan UU," ucap Hadar.

Perekaman KTP-el

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mendorong Kement-

rian Dalam Negeri segera menuntaskan perekaman data kependudukan untuk pembuatan KTP elektronik (KTP-el). Hal itu penting diwujudkan karena berkaitan dengan hak politik warga untuk memilih dan dipilih. Percepatan proses perekaman data kependudukan perlu diutamakan di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.

Kepemilikan KTP-el menjadi penting mengingat salah satu syarat dukungan bagi calon perseorangan menggunakan identitas kependudukan. Selain itu, tambah Fritz, KTP-el menjadi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih.

Ketentuan itu termuat dalam Pasal 200A Ayat (4) UU Pilkada yang menyebutkan, "Syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaf-

tar sebagai pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019".

Jika belum memiliki KTP-el, masyarakat dapat menggunakan surat keterangan yang menjadi bukti telah merekam data kependudukan yang dikeluarkan dinas kependudukan setempat.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hingga saat ini perekaman data KTP-el sudah mencakup 98,8 persen. Warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik sekitar 1,2 persen atau sekitar 2 juta penduduk.

"Untuk dukungan (bagi calon) perseorangan sangat amat cukup," sebut Zudan.

Menurut dia, jumlah warga

yang paling banyak belum merekam data kependudukan terdapat di wilayah Papua. Di wilayah tersebut, perekaman data kependudukan baru berkisar 50-60 persen. Adapun perekaman di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat sudah sekitar 90 persen.

Evi optimistis isu itu tidak akan menjadi kendala karena di dalam PKPU akan diatur mengenai surat keterangan sebagai pengganti KTP-el. Hal ini juga telah dibahas bersama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

"Surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil setempat bisa menjadi pengganti KTP-el. Maka, sepanjang warga memiliki surat keterangan, dia bisa menyalurkan hak pilihnya," kata Evi. (REK/INK)



24 November 2019

Tujuh Desa di Sidoarjo Dihapus

SIDOARJO, KOMPAS – Tujuh desa yang sepenuhnya terendam lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam proses penghapusan di daftar Kementerian Dalam Negeri. Adapun desa terendam sebagian akan digabung.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, penghapusan nomor register desa akan diikuti dengan penghentian penyaluran dana desa.

"Penghapusan desa terendam lumpur diusulkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ujar Abdul Halim dalam kunjungan kerja ke Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Sabtu (23/11/2019).

Lumpur panas menyembur di Kecamatan Porong sejak tahun 2006. Semburan lumpur ini menenggelamkan 671 hektar wilayah Sidoarjo yang tersebar di 19 desa dan 3 kecamatan, yakni Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Dari 19 desa itu, 15 desa terdampak paling parah.

Wilayah-wilayah terdampak lumpur ini pernah disebut sebagai bagian dari desa fiktif

karena menerima aliran dana desa meski areanya sudah tenggelam. Dari 15 desa itu, 8 desa di Kecamatan Porong, 4 desa di Kecamatan Tanggulangin, dan 3 desa di Kecamatan Jabon.

Namun, dana desa untuk wilayah itu tidak digunakan dan menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Berkenaan. Sejak 2017, dana desa berhenti dikurangkan oleh pemerintah pusat.

Penduduk bercerai berai

"Ada tujuh desa yang hampir semua wilayahnya tenggelam. Empat desa tenggelam murni, tiga desa sengaja ditenggelamkan karena diperlukan untuk pembangunan *spillway* (saluran pelimpah)," kata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Ia mengatakan, desa yang tenggelam itu adalah Renokenongo, Kedungbendo, Ketapang, Besuki, Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Siring. Penduduknya bercerai berai. Mereka mengurus administrasi sesuai tempat tinggal baru. Tinggal sedikit yang beridentitas di

desa asal.

Desa yang wilayahnya tenggelam total diusulkan dihapus dari daftar desa di Sidoarjo. Adapun desa yang sebagian wilayahnya tak terendam dan penduduknya masih ada diusulkan digabung. Hal itu untuk mengoptimalkan pengembangan desa dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Abdul Halim menyatakan, penggabungan ini memerlukan proses. Salah satunya, memenuhi ketentuan pembentukan desa baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penggabungan desa terdampak lumpur harus melalui pengusulan Pemkab Sidoarjo ke Kemendagri. Setelah usulan disetujui dan mendapat nomor register baru, pemerintah membuat payung hukum berupa peraturan daerah.

Sementara itu, di Desa Watesari, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelontorkan dana Rp 1,3 miliar untuk mempercepat pengembangan agrowisata belimbing. Desa ini menjadi percontohan nasional. (NIK)

1-DESEMBER 2019

Sumbar Akan Tegas soal Tambang Ilegal

Efektivitas penindakan terhadap tambang emas ilegal di sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan Jambi mensyaratkan kerja sama lintas sektor, baik pemerintah dan penegak hukum di pusat maupun daerah.

PADANG, KOMPAS — Pemangku kebijakan di Sumatera Barat berkomitmen menindak tegas aktivitas tambang emas ilegal. Selain merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana, tambang ilegal yang menggunakan merkuri juga berbahaya bagi kesehatan.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Sabtu (30/11/2019), mengatakan, pemerintah provinsi berkomitmen menindak tambang emas ilegal di Sumbar, termasuk di Solok Selatan, Dharmasraya, dan Sijunjung. Pemprov berkoordinasi dengan Polda Sumbar dalam penindakan ini.

"Kami berkoordinasi dengan kepolisian agar dilakukan penertiban. Kewenangan penindakan berada pada polisi. Semua yang ilegal itu tentu tidak dapat dibenarkan," kata Nasrul.

Dari penelusuran bersama tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sabtu-Jumat (23-29/11/2019), ditemukan aktivitas tambang ilegal di Solok Selatan, Dharmasraya, dan Sijunjung. Aktivitas menggunakan ekskavator dan mesin pompa air diesel. Kegiatan ilegal tersebut merusak Sungai Batanghari di kawasan Hutan Lindung Batanghari dan anak sungainya; merusak lahan perkebunan dan permukiman; serta merusak Taman Bumi Nasional Silokek. Di sejumlah lokasi, penambang menggunakan merkuri untuk mengolah emas.

Nasrul menyadari, aktivitas tambang emas ilegal di Sumbar tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Di Dharmasraya, angka pasien yang melakukan cuci darah me-

ningkat. Sementara itu, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, setidaknya ada enam kasus kelahiran bayi abnormal di kawasan penambangan emas dalam tiga tahun terakhir. Kasus-kasus itu diduga terjadi akibat paparan merkuri.

Selain itu, para penambang di Sumbar juga terindikasi menggunakan solar bersubsidi untuk menjalankan ekskavator dan mesin pompa air diesel. Penambang mendapatkan solar bersubsidi dari para penimbun. Ini ironis karena dalam sebulan terakhir warga Sumbar yang berhak atas solar bersubsidi kesulitan mendapatkan solar.

Mulai 1 Januari 2020, kata Nasrul, semua pihak di Sumbar harus punya komitmen bahwa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah untuk rakyat kecil. Semua pelaku tambang, perkebunan, dan mobil di atas roda enam tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi.

"Subsidi hanya untuk masyarakat kecil. Kami koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkannya. Kami juga harus melakukan rapat bersama dengan Pertamina supaya masyarakat bisa memahami, terutama yang bergerak di sektor industri, agar tidak memakai solar bersubsidi," kata Nasrul.

Lintas sektor

Menurut Nasrul, tambang emas ilegal merupakan permasalahan lintas sektor. Masalah itu tidak bisa hanya ditangani pemerintah daerah, tetapi butuh bantuan dari jajaran pemerintah pusat, kepolisian daerah, dan komando distrik militer.

"Kalau ada *beking-beking* (dalam aktivitas tambang ile-

gal), tentu semua harus dertakkan. Siapa pun yang ada di lokasi itu harus dibersihkan agar tidak melakukan pencemaran lingkungan dan tidak merusak kesehatan masyarakat," katanya.

BNPB pada Selasa (12/11) lalu mengundang Pemprov Sumbar mengikuti rapat koordinasi tentang permasalahan tambang ilegal. Pada kesempatan itu, BNPB mengajak bupati dan wali kota di Sumbar dan Jambi, termasuk gubernur di kedua provinsi itu, untuk membuat surat kepada Presiden Joko Widodo. Presiden, melalui jajarannya, diharapkan bisa membantu menertibkan tambang emas ilegal, terutama yang menggunakan merkuri.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Satake Bayu Setianto mengatakan, di tingkat Polres terus dilakukan penindakan terhadap aktivitas tambang emas ilegal di Sumbar. Polda Sumbar mendukung upaya Pemprov Sumbar dalam menertibkan tambang emas ilegal.

"Kami pasti mendukung upaya Pemprov Sumbar. Kami akan mengecek ke lapangan. Jika ditemukan aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan prosedur, kami lakukan penindakan," kata Satake.

Anggota staf Advokasi dan Penegakan Hukum Walhi Sumbar, Zulpriadi, mengharapkan keseriusan Pemprov Sumbar dan aparat penegak hukum dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal di seluruh Sumbar. Selain di Solok Selatan, Dharmasraya, dan Sijunjung, tambang emas ilegal juga terpantau di wilayah lain di Sumbar, seperti Sawahlunto dan Pesisir

Selatan. "Sejauh ini, tidak ada kemajuan berarti (dalam penertiban tambang ilegal). Polda Sumbar, sebagai ujung tombak penegakan hukum, juga harus bersih, agar anggota di bawah bertugas sesuai tugas dan fungsi. Jika ada oknum anggota yang terlibat, harus ditindak juga," kata Zulpriadi.

Erosi parah

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari memperingatkan tingkat bahaya erosi pada kawasan hulu DAS Batanghari dalam kondisi sangat berat. Kerusakan parah lingkungan bisa memicu potensi besar banjir bandang dan longsor pada musim hujan ini.

Tingkat bahaya erosi (TBE) pada sembilan kabupaten di hulu Sungai Batanghari mengalami kondisi terparah dalam dua tahun terakhir. TBE berada pada level sangat berat, yakni di atas 480 ton sedimen per hektar per tahun. Kondisi itu terjadi di Solok Selatan, Dharmasraya, dan Sijunjung (Sumbar), serta Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Merangin, Sarolangun, dan Tebo (Jambi).

Yitno Yuwono, Kepala Seksi Evaluasi BPDASHL-Batanghari, di Jambi, Jumat (29/11), mengatakan, tingkat erosi yang parah di wilayah hulu disebabkan masifnya pembukaan hutan, baik untuk tambang dan galian, pembalakan, maupun pembukaan monokultur. Terkait tambang ilegal di hulu, sejak 2014, pihaknya sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar aktivitas itu ditanggulangi agar tak semakin memicu tingginya erosi ke sungai.

(JOL/ITA)

8 DESEMBER 2019

Peternak Babi di Sumut Masih Kebingungan

Hingga kini belum ada pengumuman atas apa yang sebenarnya terjadi pada ribuan ternak babi yang mati di 16 kabupaten di Sumut. Desakan pengumuman atas keberadaan wabah demam babi Afrika pun dilontarkan.

MEDAN, KOMPAS — Kematian ternak babi di 16 kabupaten di Sumatera Utara yang belum terhentikan membingungkan peternak. Hingga kini, diperkirakan sudah 23.000 ekor babi mati dan terus bertambah.

Para peternak kebingungan dengan kejadian yang belum pernah mereka alami itu. "Kami tidak tahu harus bagaimana," kata Andri Siahaan (33), peternak babi di Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (7/12/2019).

Para peternak pun belum mendapat sosialisasi apa pun tentang penyakit ternak itu. Babi-babi masih terus dibawa keluar dari peternakan, tidak ada pembatasan lalu lintas hewan sama sekali.

Hingga kini pun belum ada tindakan apa pun dari pemerintah terhadap mereka. Yang pasti, kata Andri, wabah ini merugikan peternak.

Peternak yang umumnya memelihara 50 ekor babi per keluarga rugi sangat besar. Seharusnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, para peternak babi meraup untung dari penjualan babi.

Dengan harga Rp 30.000 per kilogram, harga babi sekitar Rp 2,5 juta per ekor. "Sekarang sebagian besar babi mati. Harga babi pun saat ini hanya Rp 10.000 per kilogram. Itu pun tidak laku," ujarnya.

Peternakan babi merupakan penopang utama keluarga peternak, seperti di Deli Serdang dan sentra ternak lain.

Awalnya, kematian ternak babi diduga terkait penyakit *hog cholera*. Namun, dugaan itu dinilai tidak tepat karena

tenak-ternak yang sudah divaksin pun banyak yang mati. Hasil uji laboratorium Balai Veteriner Medan menunjukkan, sejumlah sampel babi di Sumut positif mengalami demam babi Afrika (*african swine fever/ASF*).

Penyakit ASF sampai sekarang belum ada vaksin ataupun obatnya. Hal itu kian menimbulkan kepanikan.

Serangan wabah yang diduga ASF itulah yang antara lain merebak di sentra peternakan babi di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kematian babi hampir terjadi di seluruh peternakan di wilayah itu yang berjumlah sekitar 700 peternakan rakyat.

Tanpa pengumuman

Hingga kini belum ada upaya penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan itu. Pengumuman kejadian wabah penyakit pun belum dilakukan pemerintah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap mengatakan, pengumuman wabah penyakit merupakan wewenang Menteri Pertanian dengan melihat sejumlah kriteria, seperti peningkatan jumlah kematian, penyebaran penyakit, dan hasil pemeriksaan laboratorium.

"Saat ini kasus ASF tidak menyebar lagi dari 16 kabupaten. Jumlah ternak yang mati sekitar 1,9 persen dari populasi 1,2 juta ekor," kata Azhar. Pemerintah pun mengklaim telah meminta peternak membatasi pengiriman ternak

babi antardaerah. Desinfektan juga dibagikan ke peternak.

Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Muhammad Munawaroh mengatakan, Menteri Pertanian seharusnya mengumumkan wabah ASF agar penanganan yang dilakukan bisa maksimal, seperti diatur dalam UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Tujuan utama deklarasi wabah penyakit ASF adalah mencegah penularan penyakit kian luas," katanya.

Munawaroh mengingatkan, pemerintah pernah terlambat mendeklarasikan penyakit flu burung (*avian influenza*) yang mewabah di Indonesia pada 2003. Akibatnya, flu burung telanjur menyerang semua wilayah Indonesia. "Padahal, penyakit itu seharusnya bisa ditutup penyebarannya di daerah tertentu saja," katanya.

Jika dikhawatirkan menghentikan ekspor, menurut Munawaroh, deklarasi wabah ASF bisa dilakukan untuk zona Sumut saja sehingga ternak babi dari wilayah lain masih bisa diekspor. "Namun, lalu lintas ternak babi dari Sumut akan ditutup sehingga ASF tidak menyebar ke daerah lain," ujarnya.

Ia mengatakan, pengumuman kejadian wabah penyakit hewan akan diikuti penutupan daerah tertular, pemberantasan penyakit, pengobatan hewan, pemusnahan hewan tertular, dan alokasi dana yang memadai. Pemerintah juga wajib memberi kompensasi atas ternak yang dimusnahkan. (NSA)

MUSIM HUJAN

Banjir Pertama di Bandung Selatan

BANDUNG, KOMPAS — Banjir pertama di kawasan Bandung selatan pada musim hujan tahun ini merendam lebih dari 500 rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akibat luapan Sungai Citarum dan Cisingkuy, Sabtu (7/12/2019). Banjir dipicu hujan lebat di hulu pada Jumat malam.

Hujan lebat lebih dari tiga jam mengguyur sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung, antara lain Banjaran, Kertasari, Baleendah, dan Dayeuhkolot. Sungai Cisingkuy, anak Sungai Citarum, meluap menggenangi permukiman warga di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran.

Rohana (34), warga Andir, Baleendah, mengatakan, banjir datang Jumat sekitar pukul 23.00. Ini banjir pertama akhir tahun ini. "Banjir kiriman datang dari hulu," ujarnya, kemarin. Baleendah dan Dayeuhkolot termasuk kawasan terendah di cekungan Bandung.

Banjir setinggi lebih dari 1 meter juga menggenangi Jalan Raya Banjaran-Pangalengan dan Jalan Banjaran-Soreang. Imbasnya, kedua ruas jalan itu tak bisa dilalui kendaraan ber-

motor hingga Sabtu dini hari.

"Banjir juga melanda Desa Cibereum, Kertasari, Jumat sore. Kini sudah surut," ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Agus Mulya.

Di Cibereum, banjir menggenangi jalan desa dengan arus cukup deras. Sejumlah sepeda motor terseret banjir meski tidak ada korban jiwa.

Banjir dari Kertasari mengalir melalui Sungai Citarum, sedangkan banjir dari Banjaran mengalir lewat Sungai Cisingkuy. Akibatnya, kedua kecamatan itu kerap dilanda banjir setiap musim hujan.

Sabtu siang, banjir berangsur surut dengan ketinggian 0,5 meter. Namun, banjir berpotensi kembali naik. "Ini belum seberapa. Tahun-tahun sebelumnya, ketinggian banjir di atas 2 meter," ujar Ujang (50), warga Dayeuhkolot.

Baleendah dan Dayeuhkolot setiap tahun dilanda banjir. Desember dan Januari merupakan bulan banjir.

Kolam retensi

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi banjir di kawasan Bandung selatan, salah

satunya pembangunan Kolam Retensi Cieunteung yang dioperasikan sejak 2018. Akan tetapi, kolam seluas 8,7 hektar itu belum cukup menampung limpahan air banjir.

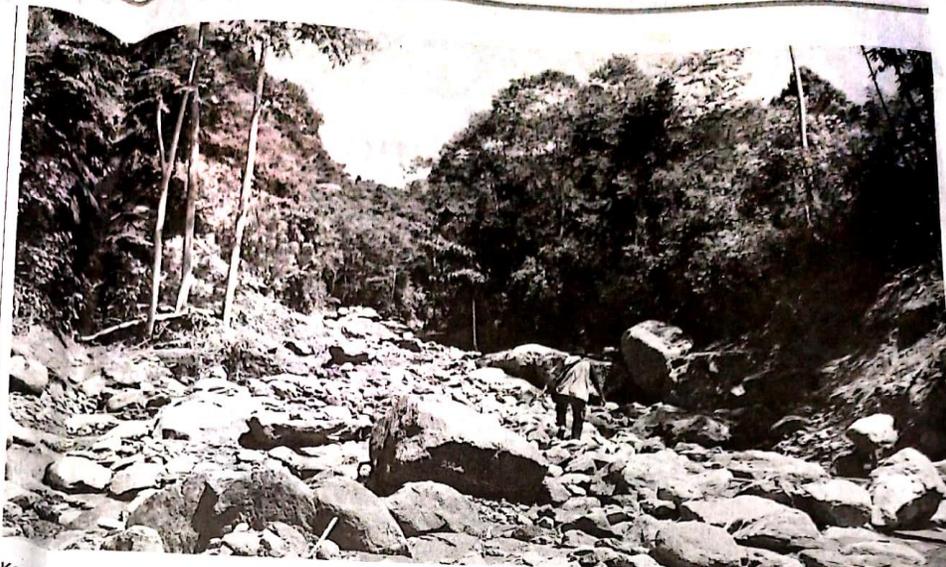
Di sejumlah permukiman warga, elevasi lebih rendah sehingga banjir tidak mengalir ke kolam retensi.

Melalui program Citarum Harum, pemerintah mencoba membenahi lahan kritis di hulu Citarum. Pohon tegakan ditanam di lahan yang sebelumnya ditanami sayuran.

Agus Mulya mengingatkan masyarakat untuk mewaspada banjir, apalagi sudah memasuki Desember.

Musim hujan juga telah berdampak bagi daerah lain. Di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, seluruh atap Kantor Bupati Sumba Tengah rusak diterjang angin puting beliung, Jumat (6/12), pukul 17.00 Wita.

Tidak ada korban jiwa meski kantor itu tidak dapat digunakan untuk sementara. Kantor yang dibangun 11 tahun lalu itu berlokasi di padang rumput terbuka sejauh 5 kilometer dari permukiman penduduk. (TAM/KOR)



Kondisi sebagian alur Sungai Magila, Sabtu (14/12/2019), yang berjarak 1,5 kilometer dari permukiman warga Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sisi kiri dan kanan sungai tersebut dijadikan kebun kakao oleh warga. Padahal, kawasan itu bagian dari Taman Nasional Lore Lindu.

Banjir Mulai Surut

Banjir bandang di Solok Selatan dan Dharmasraya, Sumbar, surut. Hal serupa juga terjadi di Sigi, Sulteng. Meski demikian, perlu kesadaran bersama untuk mencegah agar bencana tak berulang.

PADANG, KOMPAS — Warga di Solok Selatan dan Dharmasraya, Sumatera Barat, dibantu petugas mulai membersihkan rumah yang terdampak banjir. Namun, sebagian warga di Solok Selatan yang rumahnya hanyut atau tertimbun material longsor masih berada di pengungsian.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan Indah Nugraha, Sabtu (14/12/2019), mengatakan, secara keseluruhan banjir sudah surut. Walaupun, ada sebagian warga terdampak di Solok Selatan masih bertahan di pengungsian. Rumah mereka hanyut terbawa banjir bandang, tertimbun longsor, atau belum tuntas dibersihkan.

Banjir bandang serta longsor kembali melanda Solok Selatan, Jumat (13/12) pagi. Bencana melanda empat kecamatan, yaitu Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Sangir Batanghari. Bencana tersebut sudah berulang kali terjadi sejak 20 November 2019.

Catatan BPBD Solok Selatan menyebutkan, bencana pada Jumat menyebabkan satu orang meninggal serta 15 rumah dan bangunan rusak berat. Enam rumah di antaranya hanyut terseret banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Dharmasraya Edison menyatakan, banjir yang dipicu luapan Sungai Batanghari yang melanda

tu, Ia mengapresiasi langkah dari berbagai pihak yang cepat menangani kebutuhan para pengungsi. Namun, akar masalah bencana perlu dicari.

"Terjadi perubahan vegetasi di hulu akibat penebangan pohon-pohon sehingga tak ada lagi akar pohon yang menyerap dan menyimpan air. Air langsung turun ke sungai dan tanah mudah longsor," kata Doni kepada penyintas bencana, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Bolapapu, Turut hadir Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Bupati Sigi Irwan Lapatta, dan Komandan Resor 132/Tadulako Kolonel Agus Sasmita.

Menurut Doni, hal itu terjadi di berbagai daerah bencana. Karena itu, perlu ada kesadaran kolektif, baik pemerintah setempat, tokoh masyarakat, maupun warga. Kesadaran itu bermuara pada kepedulian untuk menjaga ekosistem sehingga bencana bisa dicegah.

Banjir bandang disertai lumpur, batu, dan kayu melanda Dusun III Pangana, Desa Bolapapu, Kamis (12/12) malam. Terjangan material dari Sungai Magila menewaskan 2 orang, merusak 57 rumah, 7 rumah di antaranya jebol dan roboh ditingginya.

Rumah-rumah yang diterjang banjir terletak di pinggir sungai hingga 150 meter dari tepi sungai. Lumpur merendam rumah dengan ketebalan 50 sentimeter sampai 1 meter.

Rumah-rumah yang diterjang banjir terletak di pinggir sungai hingga 150 meter dari tepi sungai. Lumpur merendam rumah dengan ketebalan 50 sentimeter sampai 1 meter.

Rumah-rumah yang diterjang banjir terletak di pinggir sungai hingga 150 meter dari tepi sungai. Lumpur merendam rumah dengan ketebalan 50 sentimeter sampai 1 meter.

Rumah-rumah yang diterjang banjir terletak di pinggir sungai hingga 150 meter dari tepi sungai. Lumpur merendam rumah dengan ketebalan 50 sentimeter sampai 1 meter.

tu, Ia mengapresiasi langkah dari berbagai pihak yang cepat menangani kebutuhan para pengungsi. Namun, akar masalah bencana perlu dicari.

"Terjadi perubahan vegetasi di hulu akibat penebangan pohon-pohon sehingga tak ada lagi akar pohon yang menyerap dan menyimpan air. Air langsung turun ke sungai dan tanah mudah longsor," kata Doni kepada penyintas bencana, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Bolapapu, Turut hadir Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Bupati Sigi Irwan Lapatta, dan Komandan Resor 132/Tadulako Kolonel Agus Sasmita.

Menurut Doni, hal itu terjadi di berbagai daerah bencana. Karena itu, perlu ada kesadaran kolektif, baik pemerintah setempat, tokoh masyarakat, maupun warga. Kesadaran itu bermuara pada kepedulian untuk menjaga ekosistem sehingga bencana bisa dicegah.

Banjir bandang disertai lumpur, batu, dan kayu melanda Dusun III Pangana, Desa Bolapapu, Kamis (12/12) malam. Terjangan material dari Sungai Magila menewaskan 2 orang, merusak 57 rumah, 7 rumah di antaranya jebol dan roboh ditingginya.

Rumah-rumah yang diterjang banjir terletak di pinggir sungai hingga 150 meter dari tepi sungai. Lumpur merendam rumah dengan ketebalan 50 sentimeter sampai 1 meter.

Sungai Magila berhulu di hutan kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Dusun III langsung berbatasan dengan kawasan itu. Penelusuran Kompas, di sepanjang kanan kiri sungai ada kebun kakao hingga 1,5 kilometer dari permukiman. Tak ada pohon besar di pinggir sungai. Kikisan air dan material banjir membentuk tebing di kiri dan kanan sungai. Di badan sungai, selain batu-batu besar, juga terlihat kayu bekas terseret banjir.

Banjir bandang sudah pernah melanda dusun itu, 3 Desember 2011. Enam korban meninggal dan puluhan rumah rusak.

Untuk pemulihan vegetasi di hulu, sekitar Sungai Magila, BNPB menyiapkan dana Rp 2 miliar untuk membeli bibit. Nantinya pemerintah bersama masyarakat menanam bibit pohon itu untuk memperkuat struktur tanah.

Doni menegaskan, pihaknya diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mencegah terjadinya bencana. Ia mengingatkan agar para pihak memperhatikan tanda-tanda alam dan informasi yang disediakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Imanuel Kaeheni (49), warga Dusun III, mengakui ada penebangan kayu di hulu, terutama sebelum banjir 2011. Sampai kini, pembalakan masih terjadi meski tak semarak dulu.

Jalan Lintas Sumbar-Riau Terancam Putus

Jalan utama yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau terancam terputus akibat retakan tanah di jalan itu yang melebar dengan cepat.

LIMAPULUH KOTA, KOMPAS — Retakan tanah dan amblesan di Jorong Simpang Tigo, Nagari Koto Alam, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menjaral ke jalan lintas Sumbar-Riau. Akses lalu lintas di jalan nasional yang menghubungkan dua provinsi itu terancam putus.

Edwar (61), warga Jorong Simpang Tigo, mengatakan, amblesan mulai menjaral ke badan jalan sejak Jumat (20/12/2019) pagi. Namun, retakan yang awalnya hanya 0,5 sentimeter itu kian parah. Retakan dipicu hujan deras yang turun dalam empat hari terakhir.

"Retakan paling besar terjadi tadi pagi. Tanahnya lunak akibat hujan dan beban berat kendaraan membuat kondisinya semakin parah," kata Edwar.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Sabtu, setidaknya terdapat empat retakan yang tersebar di ruas jalan sepanjang 50 meter. Salah satu retakannya sepanjang 30 meter, lebar 0,5 meter, dan sedalam 1,5 meter. Retakan ini terhubung dengan amblesan tanah yang merusak rumah, Selasa (10/12).

Kondisi tersebut membuat lalu lintas berlangsung satu arah dengan sistem buka tutup. Saat ramai, jalur yang dilewati truk muatan berat, bus penumpang, mobil pribadi, dan sepeda motor itu tersendat.

Sementara itu, empat rumah dan satu fondasi di Jorong Simpang Tigo yang ambles pada kejadian sebelumnya semakin parah kondisinya. Amblesan mencapai kedalaman sekitar 6 meter. Tiga hari lalu, amblesan hanya sekitar 3 meter. Pohon-pohon di jurang belakang rumah pun mulai rebah ke arah jalan.

Wali Nagari Koto Alam Abdul Malik mengatakan, retakan jalan itu harus segera diantisipasi. Jika dibiarkan, seluruh badan jalan bisa ambles dan lalu lintas terputus total. Sabtu siang, re-



Mobil melintasi jalan lintas Sumatera Barat-Riau yang retak akibat fenomena tanah bergerak di Jorong Simpang Tigo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu (21/12/2019). Retaknya jalan itu berpotensi memutus akses lalu lintas warga Sumbar ke Riau dan sebaliknya.

takan jalan ditimbulkannya menggunakan batu kerikil.

"Jalan nasional ini merupakan akses satu-satunya warga Koto Alam. Jika terputus, warga bisa terisolasi. Begitu pula akses lalu lintas Sumbar-Riau, bisa terputus total," kata Abdul.

Selain jalur mobil pribadi, bus angkutan, dan truk muatan berat, jalan itu merupakan jalur perdagangan bahan pokok seperti telur dan beras, dari Limapuluh Kota ke kabupaten/kota di Riau.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Limapuluh Kota Rahmadinol mengatakan,

jalan yang retak itu sudah dilaporkan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang. "Balai sudah menurunkan tim untuk mengkajinya secara teknis," kata Rahmadinol.

Sementara itu, retakan tanah sepanjang 300 meter di bukit Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, sejauh ini belum berdampak. Namun, retakan yang bergerak sekitar 100 meter dengan ketinggian 50 meter dari jalan lintas Sumbar-Riau itu juga berpotensi memicu longsor sehingga mengancam kendaraan yang melintas dan permukiman di seberang jalan.

Masih mengungsi

Banjir di sejumlah lokasi di Kabupaten Limapuluh Kota mulai surut dan sebagian longsor sudah dibersihkan. Namun, sebagian warga yang rumahnya terendam banjir masih mengungsi di tenda pengungsian ataupun rumah ibadah.

Warga yang mengungsi tersebar di dua kecamatan, yaitu Lurah Sago Halaban dan Harau. Di Lurah Sago Halaban, 21 keluarga mengungsi di Jorong Kubang Rasau, Nagari Balai Panjang, dan 22 keluarga mengungsi di Jorong Padang Ba-

limbiang, Nagari Bukik Sikumpa. Di Harau, 21 keluarga mengungsi di Jorong Subarang, Nagari Taran.

Kamis-Jumat (19-20/12), bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terjadi di delapan kecamatan di Limapuluh Kota.

Di Jorong Koto Lamo dan Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Kapur IX, longsor dan banjir memutus lalu lintas. Jalan kabupaten yang menghubungkan Lubuk Alai dan Koto Lamo tertutup longsor di 13 titik. Jalan kini sudah pulih kembali. (JOL)

SOMALIA

Ledakan Truk Muatan Bom, 90 Orang Tewas

MOGADISHU, SABTU — Sedikitnya 90 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka akibat ledakan besar satu kendaraan penuh bom di sebuah perempatan yang ramai di Mogadishu, Somalia, Sabtu (28/12/2019). Insiden itu adalah salah satu serangan paling mematikan di Somalia, dua tahun terakhir.

Wali Kota Mogadishu Omar Mohamud Mohamed menyebutkan korban tewas terbanyak adalah para pelajar dan mahasiswa, yang kembali masuk sekolah dan universitas mereka, setelah libur akhir pekan. Muhibo Ahmed, saksi mata di lokasi ledakan, mengatakan, mereka naik beberapa bus yang tengah lewat dan dihantam ledakan.

Menteri Luar Negeri Somalia Ahmed Awad mencuit lewat Twitter, di antara korban, juga terdapat dua warga Turki. Laporan sebuah organisasi internasional, yang tak mau disebut namanya, menyebutkan bahwa jumlah korban tewas lebih dari 90 orang. Angka yang sama, termasuk 17 polisi, juga dikemukakan seorang anggota parlemen Somalia.

Ledakan itu terjadi di sebuah perempatan di wilayah barat daya Mogadishu pada pagi yang sibuk. Lalu lintas di lokasi ini sedang padat. Di perempatan itu terdapat pos pemeriksaan dan kantor pajak. Selain ramai dengan pelajar dan mahasiswa, banyak warga setempat berangkat ke tempat kerja. Kapten Polisi Mohamed Hussein mengatakan, ledakan tersebut menarget kantor pusat pembayaran pajak.

Para korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Medina, dengan ambulans. Seorang perawat yang enggan diungkap namanya mengatakan, fasilitas tempat dia bertugas telah menerima lebih dari 100 orang luka-luka.

Hingga berita ini dibuat, belum ada pihak yang mengklaim serangan tersebut. Kelompok ekstrem Al-Shabaab biasa melancarkan serangan serupa untuk melemahkan pemerintahan Somalia, yang didukung PBB dan tentara Uni Afrika. Serangan paling mematikan, yang dituduhkan dilakukan oleh kelompok itu, terjadi Oktober 2017. Saat itu, sebuah truk penuh muatan bom meledak di dekat tanker minyak di Mogadishu, menewaskan hampir 600 orang.

Somalia, negeri di kawasan Tanduk Afrika, dilanda konflik sejak 1991 saat para panglima perang dari suku-suku menggulingkan diktator Siad Barre dan kemudian bertempur satu



Dua
dan
tah

P

(Sa

be

n

p

s

i

a

Pemerintah Lalai, Reklame Roboh

JAKARTA, KOMPAS — Reklame roboh di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, yang menewaskan satu orang, Sabtu (28/12/2019) sekitar pukul 11.20, sudah dua kali dilaporkan untuk dibongkar. Hal ini karena kondisi papan reklame sudah membahayakan. Namun, hingga sesaat sebelum roboh, tak ada upaya antisipasi musibah.

Camat Cengkareng M Fakhri mengatakan, pihaknya sudah dua kali bersurat ke Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, salah satunya pada Agustus lalu. UPPRD Cengkareng pun sudah meneruskan surat itu dengan bersurat kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta yang berwenang membongkar reklame.

Laporan tersebut dilakukan karena pihak kecamatan khawatir akan kondisi reklame yang sudah membahayakan. Pihaknya meminta pembongkaran papan reklame setinggi sekitar 17 meter itu. "Pihak kecamatan tak berwenang membongkar reklame karena izin dikeluarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta serta pengawasan dan pembongkaran wewenang Dinas Cipta Kar-

ya, Tata Ruang, dan Pertanahan," kata Fakhri di Jakarta, Sabtu (28/12).

Hingga berita ini disusun, identitas pemilik reklame tersebut belum diketahui. Menurut Fakhri, sejumlah papan reklame di kawasannya diusulkan dibongkar karena ada yang membahayakan, menunggak pajak, atau berada di lokasi yang tak semestinya.

Papan reklame yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas di Jalan Daan Mogot Kilometer 13 itu roboh kemarin siang dan menimpa pengendara sepeda motor, Rusianto (49). Korban tewas dengan luka di seujur tubuh.

Kepala Kepolisian Sektor Cengkareng Komisaris Khoiri mengatakan, hasil identifikasi di lokasi menunjukkan besi-besi penyangga dan tiang utama keropos. Beberapa saksi juga menyebutkan kondisi papan reklame itu sudah goyang saat ada angin. Bahkan, pernah dibuat laporan resmi terkait kondisi papan reklame itu kepada UPPRD Cengkareng.

"Jadi, sebenarnya sudah ada tanda-tanda roboh, tetapi mungkin belum ada tindakan atau bagaimana," kata Khoiri.

Korban Rusianto yang bekerja sebagai pengemudi ojek dalam jaringan tengah dalam perjalanan dari arah Kalideres ke arah Grogol. Ia tertimpa papan reklame itu sekitar pukul 11.00 saat berhenti di lampu merah. Warga Jatisampurna, Bekasi, itu langsung dibawa ke RSUD Cengkareng. Sepeda motornya, merek Honda Beat warna putih, rusak berat.

Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari ada tidaknya unsur pidana dalam kejadian itu. Pemilik reklame saat ini masih dicari. "Papan roboh dan rusak berat. Kami masih berusaha memeriksa iklan apa di sana, siapa pemiliknya," ujar Khoiri.

Sementara itu, sebuah papan reklame lain setinggi belasan meter juga roboh di depan Halte Transjakarta Rawa Buaya, Cengkareng, sekitar pukul 12.05. Tak dilaporkan ada korban pada kejadian ini. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, pemin-dahan papan reklame dilakukan petugas pemadam kebakaran bersama petugas penanganan prasarana dan sarana umum, serta dari kelurahan, polsek, dan koramil setempat. (IRE)

RIWAYAT HIDUP



Kadek Suriani , jenis kelamin perempuan. Lahir di Lokapaksa, 21 Juni 1997, lahir sebagai anak kedua dari pasangan Wayan Subiksa dan Putu Sri Tami. Lahir dari anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu, berasal dari Desa Lokapaksa. Desa Lokapaksa, Banjar Dinas Gunung Ina, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) di SD N 2 Lokapaksa lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP N 1 Seririt dan lulus 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) di SMA N 1 Seririt dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha 2016 dengan mengambil jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada akhir tahun 2020 ini, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Bahasa Jurnalistik Berita Langsung dalam Surat Kabar *Kompas* dan Kebermanfaatannya sebagai Media Pembelajaran Menulis Berita di Kelas VIII SMP N 1 Seririt”.

